

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SANTOSA
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 1000188

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.252.000.000
1. Tanah Seluas 747 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 747.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 342 m2/342 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 855.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	135.000.000
1. MOTOR, HONDA NC12A1CF AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
2. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 E M-CVT CKD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
3. LAINNYA, MOTOR LISTRIK MOTOR LISTRIK Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	145.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.298.563
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.541.298.563
III. HUTANG	Rp.	353.956.020
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.187.342.543

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.